

# RENJA TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH

**KABUPATEN LUWU TIMUR**





# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : [bpbdkabluwutimur@gmail.com](mailto:bpbdkabluwutimur@gmail.com)

---

## KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 21 TAHUN 2022

### TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah KAbupaten uwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21);
32. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- KESATU : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 22 Juni 2022

**KEPALA PELAKSANA,**  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunannya.

Malili, 14 Juni 2023

 **KERALA PELAKSANA,**  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	4
1.3    Maksud dan Tujuan.....	8
1.4    Sistematika Penulisan.....	9
BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	1
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3    Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	73
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	76
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	74
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	76
3.1    Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	76
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	84
3.3    Program dan Kegiatan.....	85
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	91
BAB V     PENUTUP .....	96

**DAFTAR TABEL T-C**

Tabel TC.29	: Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	11
Tabel TC.30	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
Tabel TC.31	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	77
Tabel TC.32	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan .....	75
Tabel TC.33	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Renja BPBD Tahun 2023.	102

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pengukuran Capaian Kinerja.....	11
Tabel 2 : Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1 .....	24
Tabel 3 : Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 .....	27
Tabel 4 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	30
Tabel 5 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	30
Tabel 6 : Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....	32
Tabel 7 : Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....	32
Tabel 8 : Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....	33
Tabel 9 : Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....	34
Tabel 10 : Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan .....	37
Tabel 11 : Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan .....	39
Tabel 12 : Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan .....	45
Tabel 13 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung .....	53
Tabel 14 : Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	56
Tabel 15 : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	57
Tabel 16 : Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung .....	57
Tabel 17 : Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2023 .....	99

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 .....	23
Grafik 2 : Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2021 .....	23
Grafik 3 : Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021 .....	26
Grafik 4 : Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2021 .....	37
Grafik 5 : Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021 .....	52
Grafik 6 : Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021 .....	52

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak – hak dasar, termasuk perlindungan dan hak – hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman dan resiko bencana.

Terkait dengan penanggulangan bencana kemudian diterbitkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana disebutkan bahwa yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana adalah Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta. Kemudian tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka pendirian BPBD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bencana alam di Kabupaten khususnya Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan pengelolaan bencana tersebut diperlukan adanya perencanaan dan penganggaran yang optimal. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

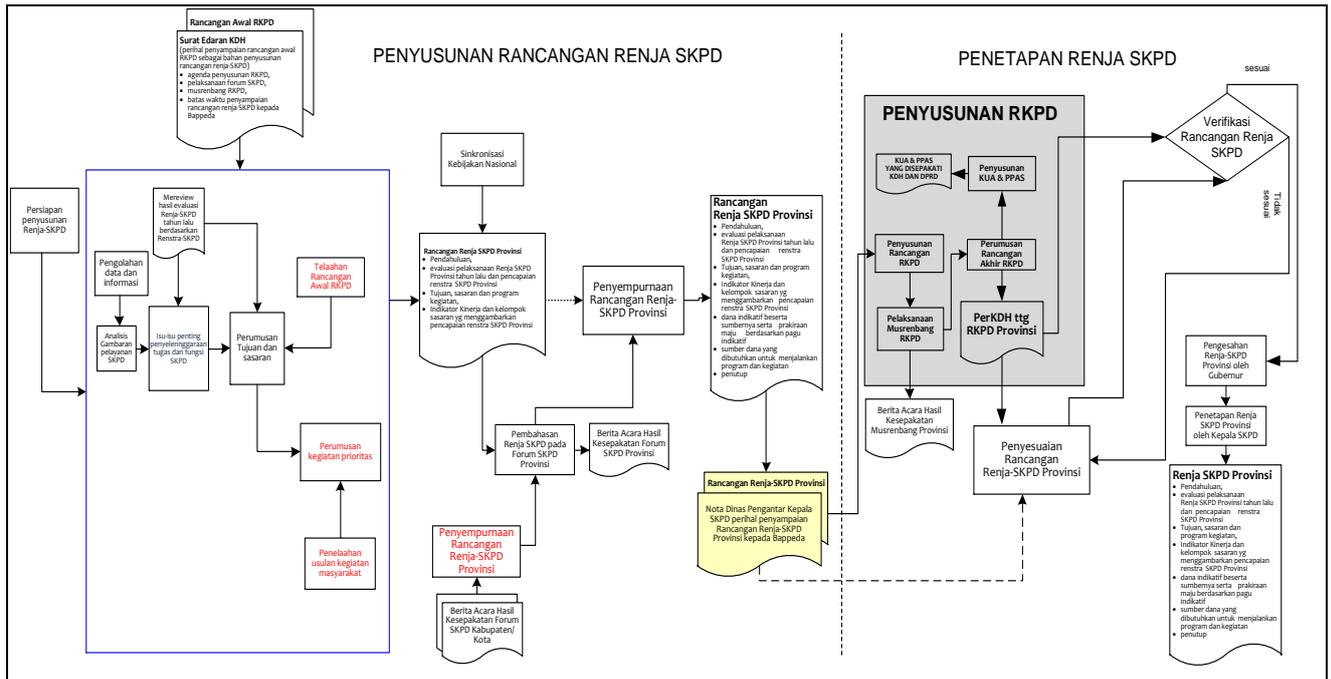
1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1: Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD

Rencana Kerja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu BPBD harus mampu mengambil peran secara optimal, utamanya di dalam penganggulangan bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Rencana Kerja BPBD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sebagaimana telah dijabarkan kedalam Renstra BPBD 2021-2026.

Peran dan fungsi Renstra sangat penting dalam penetapan Rencana Kerja tahunan. Rencana Kerja harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan

disusun secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan agar dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang partisipatif dan berkesinambungan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);

28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah KAbupaten uwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21);
33. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
34. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya dan menentukan prioritas-prioritas di bidang pencegahan, penanggulangan bencana , kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana penanggulangan bencana.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2023.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. Mewujudkan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien.
4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini memuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capain Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.
- BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 s.d Tahun berjalan(\*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL. (TC.29)**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2022**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegi atan Renja SKPD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)					
					Target Renja SKPD 2021 (n- 2)	Realisasi Renja SKPD 2021 (n- 2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4				
1														
1	05													
1	05	01	2.01											
1	05	01	2.01	01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, panganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %	0 %	100 %	125 %	125 %	100 %	125 %	125 %
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	13 Doku men	0 Doku men	2 Doku men	3 Doku men	150 %	2 Doku men	5 Doku men	38 %
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	12 Doku men	0 Doku men	2 Doku men	3 Doku men	150 %	2 Doku men	3 Doku men	25 %

1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	12 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150 %	2 Dokumen	3 Dokumen	25 %
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	60 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	10 Dokumen	20 Dokumen	33 %
1	05	01	2.02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik</b>	100 %	0 %	100 %	89.47 %	89.47 %	100 %	89.47 %	89.47 %
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	120 Orang	0 Orang	19 Orang	15 Orang	78.95 %	20 Orang	15 Orang	13 %
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	108 Dokumen	0 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	18 Dokumen	36 Dokumen	33 %
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.03		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar</b>	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %

1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	24 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	8 Dokumen	33 %
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	125 %	125 %
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	105 stel	0 stel	18 stel	18 stel	100 %	0 stel	18 stel	17 %
1	05	02	01	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	83 Orang	0 Orang	10 Orang	15 Orang	150 %	10 Orang	15 Orang	18 %
1	05	02	01	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0! %	0 Laporan	0 Laporan	0 %
1	05	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah</b>	100 %	0 %	100 %	105.3 %	105.30 %	100 %	105.3 %	105.3 %
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	120 jenis	0 jenis	20 jenis	19 jenis	95 %	20 jenis	19 jenis	16 %

1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	1625 orang	0 Orang	275 Orang	272 Orang	98.91 %	275 Orang	272 Orang	17 %
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	48 jenis	0 jenis	8 jenis	8 jenis	100 %	8 jenis	16 jenis	33 %
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	360 eksp	0 eksp	60 eksp	60 eksp	100 %	60 eksp	120 eksp	33 %
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	18 jenis	0 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	3 jenis	6 jenis	33 %
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	353 kali	0 kali	58 kali	80 kali	137.93 %	50 kali	130 kali	37 %
1	05	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi</b>	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	85.71 %	85.71 %
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	0 Unit	0 Unit	0 %
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	91 unit	0 unit	7 unit	6 unit	85.71 %	13 unit	19 unit	21 %

1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	8 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	27 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	4 unit	4 unit	15 %
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	0 unit	0 unit	0 %
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0! %	1 unit	0 unit	0 %
1	05	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100 %	0 %	100 %	99.86 %	99.86 %	100 %	99.86 %	99.86 %
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2400 Surat	0 surat	400 surat	498 surat	124.50 %	400 surat	898 surat	37 %
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	12 orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	100 %	2 Orang	4 Orang	33 %
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	216 rekening	0 rekening	36 rekening	36 rekening	100 %	36 rekening	72 rekening	33 %
1	05	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan</b>	100 %	0 %	100 %	93.25 %	93.25 %	100 %	93.25 %	93.25 %

					<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>pemerintahan yang terpelihara dengan baik</b>								
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15 unit	0 unit	13 unit	13 unit	100 %	13 unit	26 unit	173 %
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	0 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	4 unit	33 %
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	110 unit	0 unit	79 unit	63 unit	79.75 %	29 unit	92 unit	84 %
1	05	02	05	06	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	(1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	0 %	100 %	88.23 %	88.23 %	100 %	88.23 %	88.23 %
						2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
						(3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.75 %	0 %	0.10 %	0.093 %	93 %	0.10 %	0.093 %	12.40 %

1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0! %	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	2250 orang	0 Orang	300 Orang	280 Orang	93.33 %	300 Orang	580 Orang	25.78 %
1	05	03	2.02		<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	21.8 %	0 %	0.21 %	0.33 %	157.14 %	2.12 %	2.45 %	11.24 %
						<b>Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun</b>	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	300 Orang	0 Orang	45 Orang	44 Orang	97.78 %	50 Orang	94 Orang	31.33 %
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1175 orang	0 orang	150 orang	116 orang	77.33 %	100 orang	216 orang	18.38 %
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	33 %
						Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	6 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	33 %

1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dok)	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	0 dokumen	0 dokumen	0 %
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	2700 orang	0 unit	450 Orang	834 Orang	185.33 %	250 orang	1,084 Orang	40 %
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk (Desa)	20 Desa	0 desa	0 desa	0 desa	#DIV/0! %	4 desa	4 desa	20 %
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal (dokumen)	2 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	1 dokumen	1 dokumen	50 %
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	136 unit	0 unit	20 unit	20 unit	100 %	20 unit	40 unit	29 %
1	05	03	2.03		<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender</b>	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (%)	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	0 %	0 %
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	05	03	2.04		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan (%)</b>	100 %	0 %	0 %	0 %	#DIV/0! %	100 %	100 %	
1	05	03	2.05	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi (Lembaga)	1 Lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	#DIV/0! %	0 lembaga	0 lembaga	0 %
1	05	03	2.05	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun (Dokumen)	9 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0! %	3 Dokumen	0 dokumen	0 %
1	05	03	2.05	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	16 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	#DIV/0! %	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 %
1	05	03	2.05	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan (unit)	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0! %	0 Unit	0 Unit	0 %

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang *ex officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Luwu Timur**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	-	0.43	0.44	0.45	0.46	-	0.43	0.44	0.45	
2		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	18.05%	88.23%	100%	100%	
3		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	14.41%	100%	100%	100%	
4		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

- ❖ Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

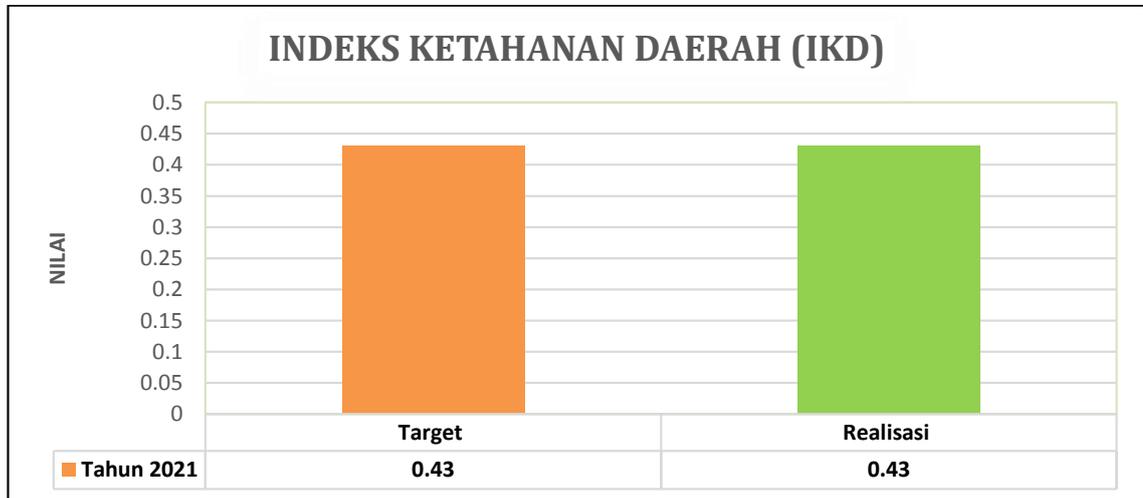
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sasaran, Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

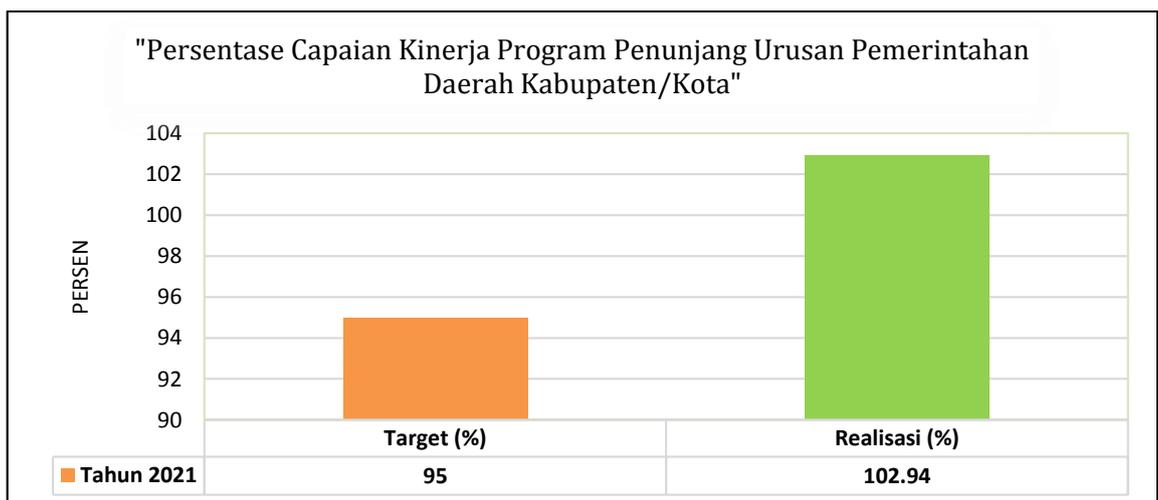
**Tabel. 1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,43 %	0,43 %	100	●
2.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	102,94%	108,36	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

**Sasaran Strategis I****Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana**

**Grafik. 1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021**

**Sasaran 2 (Sasaran Pendukung)****Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**

**Grafik. 2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Penunjang Tahun 2021**

## SASARAN STRATEGIS 1

### “Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana”

Tabel. 2  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Sasaran I	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.43	0.43	100%

#### Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **“Nilai Indeks Ketahanan Daerah”**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2021 adalah 0,43 dan telah tercapai 0,43 dengan persentase capaian kinerja 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2021 yang bersumber dari OPD terkait seperti Bappelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan dsb.

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :
  - Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
  - Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
  - Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
  - Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
  - Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
  - Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
  - Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
  - Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
  - Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
  - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
  - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
  - PUSDALOPS BPBD
  - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
  - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
  - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
  - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD
  - Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
  - Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
  - Penataan Ruang berbasis PRB
  - Desa Tangguh Bencana
  - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl Inco Soroako)
  - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
  - Rehabilitasi tanggul sungai
  - Normalisasi/Restorasi sungai

- Pembangunan Bendung Sungai
  - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
  - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
  - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
- Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
  - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
  - Penentuan Status Darurat Bencana
  - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
  - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
  - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
  - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
  - Penghentian Status Darurat Bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
- Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana).



**Grafik. 3**  
Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

**Tabel. 3**  
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.57	0.43	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.37		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.63		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.56		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.32		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.20		

❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu :

- Program Penanggulangan Bencana :
  1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

➤ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
- Ketersediaan anggaran pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD baru dianggarkan pada tahun 2022.

➤ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- segera melakukan FGD untuk penilaian IKD.

➤ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih dapat ditunda pelaksanaannya.
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah
- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2021, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana yaitu : Logistik Siaga Darurat 10 paket, sandang 5 paket, Paket Kesehatan Keluarga 5 paket, Family Kit 5 paket, Logistik Pangan (Beras, Mie Instan, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir) 100 paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat gigi, Pasta gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak Kayu putih) 70 paket, Perlengkapan Bayi (Minyak telon, Popok, Bedak Bayi) 70 paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut, Alas Tidur) 60 paket dan Masker Medis 6000 pcs.
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pelaksanaan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, capaian kinerja melebihi dari target yang direncanakan, dari target 450 org dan terealisasi 834 org karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan dari Bank Sulselbar sehingga dalam pelaksanaan gladi dapat melibatkan banyak orang, dan hal ini berimplikasi terhadap capaian SPM urusan bencana.

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut. Dan penyebaran informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial yaitu PUSDALOPS BPBD.
- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 43 orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 3 orang Upah Jasa, dan 25 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.
- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada.

## ❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

**Tabel. 4**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.43	0.43	100%	1.948.307.027	1.639.892.198,20	84,17%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	88.23%	88.23%	107.286.470,-	86.193.250,-	80,34%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	634.827.561,-	538.465.344,20	84,82%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	1.206.192.996,-	716.108.231	97,79%

**Tabel. 5**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100%	84,17%	15,83%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 100% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 84,17%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 15,83%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

- Adanya Data Base (Baseline 2018) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan bagian dari penilaian Kota Tangguh Bencana pada Tahun 2018
- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD pada bulan Nopember 2021 oleh BPBD Propinsi Sul-Sel
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD tahun 2018 yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Banjir, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026.



### Capaian SPM Penanggulangan Bencana

---

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun **Target nasional** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah **100% setiap tahun**. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 6**  
**Target SPM Capaian Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

**Tabel. 7**  
**Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			Anggaran		(%)
		Indikator Capaian	Target (%)	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	88.23%	107,286,470	86,193,250	80.34
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	290,937,586	256,392,350	88.13
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	1,206,192,996	1,015,233,604	84.17

**Tabel. 8**  
**Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta**  
**Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
			Anggaran		
			APBN	APBD	Sumber dana lain yang sah
1	2	3	4	5	6
		<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	-	<b>1,604,417,052</b>	-
1	<b>Pelayanan Informasi Rawan bencana</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	-	<b>107,286,470</b>	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	107,286,470	-
2	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	-	<b>290,937,586</b>	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	144,178,556	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	9,000,000	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	85,784,820	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	51,974,210	-
3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	-	<b>1,206,192,996</b>	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	775,623,100	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	100,130,000	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	160,491,078	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/ Wabah Penyakit	-	169,948,818	-

**Tabel. 9**  
**Kendala, Permasalahan dan Solusi**  
**SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan**  
**Masyarakat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(1).Adanya penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4, menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya sampai dengan triwulan IV. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kehadiran peserta dalam pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana. Dan hal ini mempengaruhi tingkat capaian SPM. (2).Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Hibmauan Peringatan Dini dan Media Sosial, (2).Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, (3).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1). Adanya penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4, menyebabkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya sampai dengan triwulan IV. Dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kehadiran peserta dalam pelaksanaan kegiatan. Dan hal ini mempengaruhi tingkat capaian SPM. (2). Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	(1).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, (2).Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1).Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, (2).Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, (3).Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	(1).Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, (2).Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, (3).Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, (4). Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

## 1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

---

### ❖ Program Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Tujuan program penanggulangan bencana** yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**Sasaran program adalah :** (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, (2) Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, (3) Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

**Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2021 adalah :**

#### 1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

**Formulasi :** “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 88,23% dengan persentase capaian kinerja 88,23%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten 280 org, Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD 4.953 org, Papan himbauan informasi bencana di 9 kecamatan 234.687 org dan Rambu evakuasi di 8 desa di Kec. Malili 26.578 org

dengan akumulasi sebesar 266.498 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 2 kecamatan yang tidak dipasang papan himbauan karena kondisinya rusak berat.

**2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

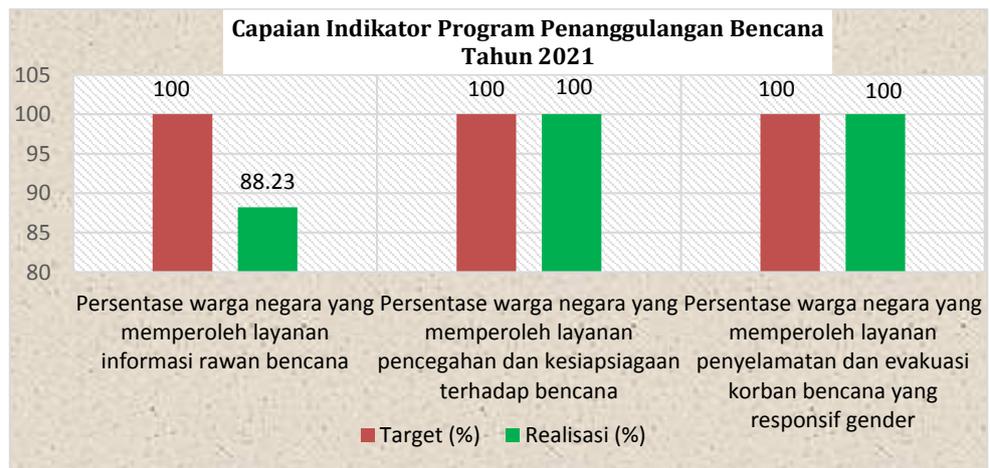
**Formulasi** : *“Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus”.*

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 116 org, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 834 org, Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi, Desa Atue dan Desa Kalpataru, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat deteksi gempa bumi sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kerjanya sebesar 100%.

**3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

**Formulasi** : *“Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus”.*

Target tahun 2021 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 178 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.

**Grafik. 4**

Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2021

Pada tahun 2021, Program Penanggulangan Bencana didukung oleh 3 kegiatan Utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana yaitu :

**1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

**Tabel. 10**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,10%	0,093 %	93%
a.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	300 org	280 org	93,33%

***Pelayanan informasi rawan bencana adalah*** pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

***Indikator kegiatan*** adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan ***Formulasi*** : *Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus*. Target Tahun 2021 adalah 0,10% (300 org) dan realisasi 0,093% (280 org) dengan persentase capaian kinerja 93%.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

***Indikator sub kegiatan*** adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 300 orang dan realisasi 280 orang, persentase capaian 93,33%. Capaiannya kurang dari target karena kegiatan yang dilaksanakan akhir tahun dengan mengundang kepala desa, aparat desa dan relawan yang kemungkinan besar mempunyai kegiatan yang bersamaan pada akhir tahun. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada triwulan III namun baru dapat terlaksana pada triwulan IV karena adanya Instruksi Bupati terkait penerapan PPKM yang semula dari PPKM level 3 menjadi PPKM level 4 sehingga dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan yang menghadirkan banyak orang yang berpotensi dalam penyebaran virus covid-19. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 107.286.470,- dan realisasi Rp. 86.193.250,- (80,34%) terdapat sisa anggaran yang cukup

besar yaitu Rp. 21.093.220,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 280 orang dari 300 orang peserta yang diundang, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta sosialisasi. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai target yang telah direncanakan.

### Dokumentasi



## 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 11  
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,21%	0,33 %	157,14%
			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%	100%	100%
a.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kot a	Terlatihnya aparaturnya dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	150 org	116 org	77,33%
b.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kot a	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	20 unit	20 unit	100%

c.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
		Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana	Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	45 org	44 org	97,78%
e.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	450 org	834 org	185,33%

***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah***

serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

***Indikator kegiatan adalah*** (1) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (2) Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun. *Adapun formulasinya adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah seluruh warga negara dan aparatur yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus.* Target dari indikator 1 adalah 0,21% (645 org) dan realisasi 0,33% (994 org) dengan persentase capaian kinerja 157,14%. Sedangkan target indikator 2 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian 100%.

Pencapaian target kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan target 150 orang dan realisasi 116 orang, persentase capaian kinerja 77,33%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena beberapa peserta tidak sempat hadir karena bertepatan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan di akhir tahun. Berdasarkan anggaran kas sub kegiatan direncanakan pada Triwulan III karena adanya PPKM Level 4 maka kegiatan tersebut di tunda pelaksanaannya pada Triwulan IV. Disediakan anggaran sebesar Rp. 144.178.556,- dan terealisasi Rp. 128.714.150,- (89,27%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 15.464.406,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 116 orang dari 150 orang peserta yang diundang, sehingga mempengaruhi realisasi keuangan beberapa jenis belanja yang disediakan untuk peserta pelatihan. Namun telah diupayakan untuk mengundang peserta sesuai dengan target yang telah direncanakan.

**Dokumentasi**



- **Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 20 unit dan realisasi 20 unit, persentase capaian kinerja 100%. Adapun sarana dan prasarana yang diadakan yaitu pengadaan kantung jenazah. Disediakan anggaran sebesar Rp 9.000.000,- dan realisasi Rp 8.500.000,- (94,44%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp 500.000,- yang merupakan sisa belanja.

Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat dengan target 45 orang dan realisasi 44 orang, persentase capaian kinerja 97,78%. Jenis pelatihan yang diberikan adalah Teknik Penyelamatan di Air (Water Rescue) dengan instruktur dari BASARNAS (Koord. Pos SAR Unit Siaga Luwu Timur) dan Koord. Pos TNI AL Lampia. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II TA. 2021, namun pelaksanaannya ditunda sampai Triwulan III karena menyesuaikan waktu/kesediaan Narasumber dari BPBD Provinsi. Disediakan anggaran sebesar Rp. 85.784.820,- dan terealisasi Rp.68.059.200,- (79,34%). Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp. 17.725.620,- karena jumlah peserta yang hadir hanya 44 orang dari

target 45 org sehingga mempengaruhi realisasi belanja makan minum peserta, biaya sewa penginapan dan pengadaan baju peserta.

### **Dokumentasi**



#### **- Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 450 orang dan realisasi 834 orang dengan persentase capaian kinerja 185,33%. Realisasi Sub kegiatan ini terdiri dari Apel Siaga Bencana dengan jumlah peserta 450 org dan Simulasi dengan jumlah peserta 384 org. Jumlah peserta simulasi melebihi dari target karena guru-guru sangat antusias untuk menghadirkan murid-muridnya untuk menghadiri kegiatan. Sedangkan jumlah peserta Apel Siaga Bencana bisa melebihi target karena adanya dukungan makanan dan minuman dari PT. Vale Indonesia dan dari Bank Sulselbar, sehingga jumlah peserta Apel yang diundang lebih dari yang direncanakan. Disediakan Anggaran sebesar Rp. 51.974.210,- dan terealisasi Rp 51.119.000,- (98,35%). Dalam pelaksanaan Apel Siaga Bencana, jumlah peserta yang direncanakan hanya 200, namun yang diundang sebanyak 450 org dengan adanya dukungan makanan dan minuman untuk peserta dari PT. Vale Indonesia dan Bank Sulselbar, sehingga anggaran yang tersedia cukup untuk membiayai kegiatan.

### Dokumentasi Apel Siaga bencana



### Dokumentasi Simulasi Gempa



#### - **Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disusun dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen, persentase capaian kinerja 100%. Dokumen tersebut berisi rekomendasi usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil identifikasi, dan akan diteruskan ke OPD terkait yang menangani ataupun dapat diusulkan ke BNPB (Dana Hibah RR) melalui proposal. Selain penanganan pasca

bencana, hasil identifikasi juga diarahkan untuk penanganan mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi bencana, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. Disediakan anggaran sebesar Rp 343.889.975,- dan terealisasi Rp 282.072.994,- (82,02%). Realisasi keuangan terdiri dari belanja modal pekerjaan fisik Rp. 215.126.094,20, Belanja ATK Rp. 4.283.000,-, Belanja Perjalanan Biasa Rp. 62.663.900,-, sedangkan untuk Belanja Cetak dan Penggandaan tidak terealisasi disebabkan anggaran penggandaan menggunakan Administrasi Proyek pekerjaan fisik dan untuk jilid dilakukan sendiri dengan ATK yang tersedia dan untuk Belanja Makan dan Minum Rapat yang diperuntukkan untuk rapat-rapat koordinasi dengan OPD lain terkait penanganan sarana dan prasarana infrastruktur terdampak bencana juga tidak terealisasi karena tidak terdapat kejadian bencana yang memerlukan penanganan yang signifikan yang sifatnya lintas OPD.

### 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

**Tabel. 12**  
**Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan**

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100 %	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%
b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%
c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%

***Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah*** serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Dengan dasar pemikiran bahwa keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

Kegiatan ini bertujuan untuk : (1) menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau dikhawatirkan akan hilang akibat bencana, (2) Menolong korban bencana yang sakit akibat bencana, (3) Menindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

***Indikator kegiatan adalah*** Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender dengan **Formulasi** : Jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi dibagi jumlah perkiraan korban bencana dikali seratus dengan target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja 100% karena berdasarkan jumlah kejadian bencana pada tahun 2021, terdapat 250 korban terdampak, dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dan semua kejadian bencana yang terjadi, direspon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 178 kejadian terdapat 8 kejadian bencana yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 153 kejadian (gempa bumi) dilakukan pengecekan data pada Sistem WRS (Warning Receiver System) dan dilaporkan ke pusat dan propinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Cuaca ekstrim (angin kencang) 6 kejadian, Longsor 1 kejadian dan Kebakaran rumah 10 kejadian, difasilitasi dengan penyaluran bantuan logistik. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana yang terjadi.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota**  
**Indikator sub kegiatan adalah :** Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Desember 2021 (178 kejadian) yaitu Banjir 2 kejadian, orang hilang/tenggelam 5 kejadian, kebakaran rumah 10 kejadian, kebakaran lahan 0 kejadian, cuaca ekstrim 6 kejadian, longsor 2 kejadian dan gempa bumi 153 kejadian dan semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD. Disediakan anggaran sebesar Rp. 775.623.100,- dan terealisasi sebesar Rp 696.898.100,- atau sebesar 89,85 % dari pagu anggaran perubahan. Realisasi tidak sesuai dengan target karena terdapat 8 orang personil Tim Reaksi Cepat yang mengundurkan diri pada waktu yang berbeda dan terdapat juga 4 orang personil pengganti, sehingga berpengaruh terhadap realisasi belanja jasa (honor TRC) dan belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan TRC.

#### Dokumentasi



- **Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana mulai bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa (124 laki-laki dan 126 perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Disediakan anggaran sebesar Rp 100.130.000,- dengan realisasi Rp. 57.656.000,- atau sebesar 57,58 %. hal ini disebabkan karena hingga triwulan IV tidak terdapat kejadian bencana berskala besar dan membutuhkan pembiayaan yang signifikan. Anggaran ini sifatnya disediakan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim diakhir tahun berdasarkan informasi kebencanaan yang ada.

**Dokumentasi**



- **Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang, pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 250 jiwa (124 laki-laki dan 126 perempuan), dari jumlah tersebut, sebanyak 242 jiwa yang memerlukan bantuan logistik sedangkan selebihnya (korban org hilang/tenggelam) hanya diberikan bantuan pertolongan dan evakuasi. Bantuan logistik yang diberikan berupa sandang pangan maupun hunian sementara (tenda). Disediakan anggaran sebesar Rp 160.491.078,- dengan realisasi keuangan Rp. 100.419.404,- atau sebesar 62,57 %. Terdapat sisa anggaran yang cukup besar yaitu belanja sandang pangan Rp 33.905.000,-, belanja paket pengiriman Rp 15.000.000, serta perjalanan dinas Rp 8.993.596,-. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi keuangan adalah tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan dan terdapat bantuan logistik penanggulangan bencana dari BPBD Provinsi di Makassar yang telah diserahkan pada bulan agustus 2021. Jenis bantuan logistik yang diperoleh dari propinsi yaitu : Logistik Siaga Darurat 10 paket, sandang 5 paket, Paket Kesehatan Keluarga 5 paket, Family Kit 5 paket, Logistik Pangan (Beras, Mie Instan, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir) 100 paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat gigi, Pasta gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut, Sarung, Minyak Kayu putih) 70 paket, Perlengkapan Bayi (Minyak telon, Popok, Bedak Bayi) 70 paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut, Alas Tidur) 60 paket, Masker Medis 6000 pcs. Untuk belanja paket pengiriman tidak terealisasi karena disediakan untuk biaya pengiriman peralatan namun terkendala administrasi sehingga tidak realisasi sampai akhir tahun.

### Dokumentasi Penyaluran Bantuan Logistik



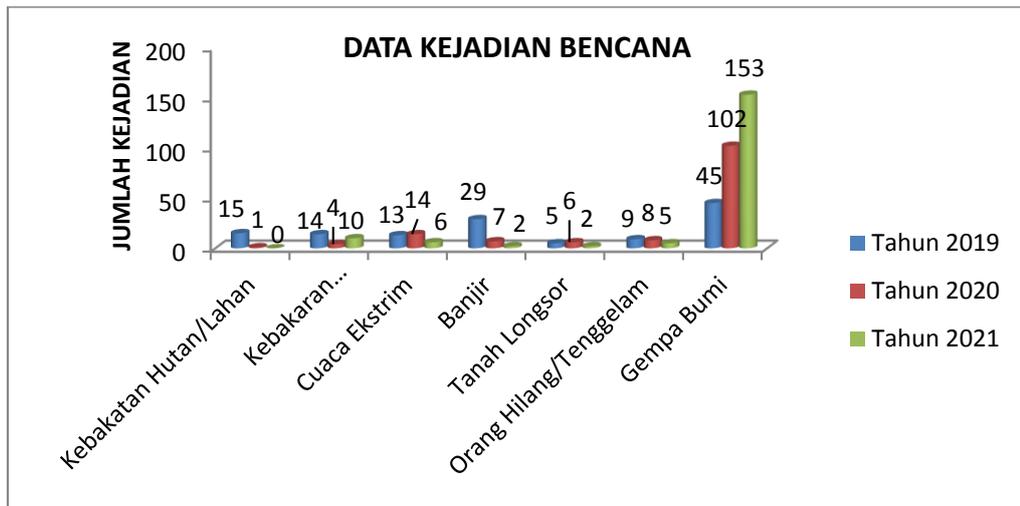
#### - **Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit**

**Indikator sub kegiatan adalah** Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait penyemprotan disinfektan di tempat-tempat strategis sesuai permintaan serta pemulasaran dan pemakaman jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. Adapun jumlah masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) sebanyak 141 jiwa dan dilakukan respon cepat pemulasaran kurang dari 24 jam setiap informasi yang diterima oleh TRC BPBD. Disediakan anggaran sebesar Rp 169.948.818,- dengan realisasi anggaran Rp.160.260.100,- . atau sebesar 94,30%. Penggunaan anggaran yang cukup besar karena terjadi peningkatan jumlah korban meninggal terkonfirmasi Covid19 yang harus ditangani pada pertengahan tahun 2021 sampai awal bulan Desember 2021. Sisa anggaran sebesar Rp 9.688.718,- terdiri dari belanja ATK Rp 137.218,- belanja makan dan minum rapat Rp 5.250.000,- belanja makan dan minum aktifitas lapangan Rp 775.000,- dan belanja perjalanan dinas Rp 3.526.500,-. Belanja makan minum rapat tidak terealisasi karena kegiatan rapat terkait penanganan covid-19 dilakukan di Dinas Kesehatan (Satgas Covid-19). sedangkan

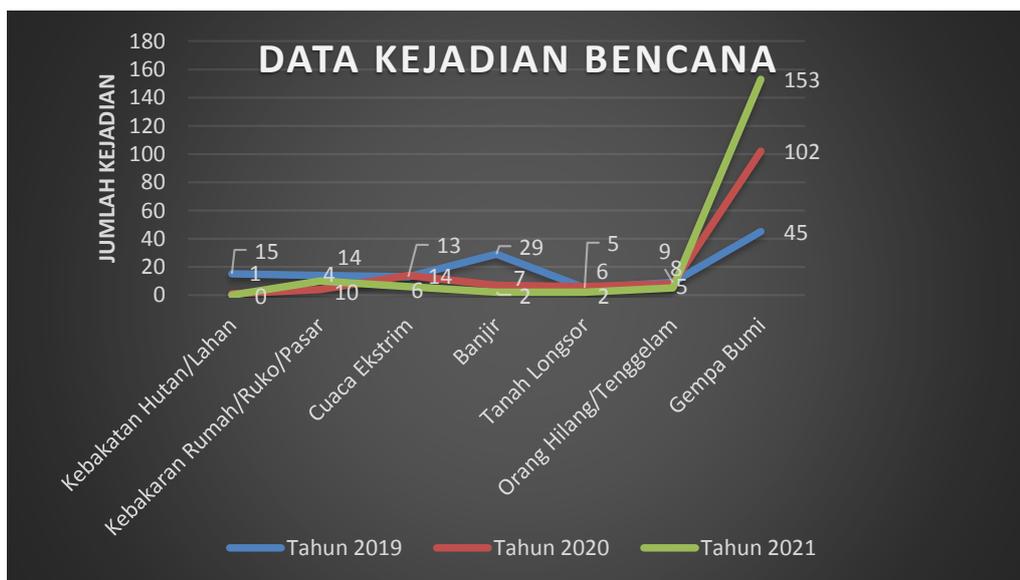
penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kegiatan pemulasaran jenazah covid-19 dilapangan.

**Dokumentasi Pemulasaran Jenazah Covid-19**





**Grafik. 5**  
Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021



**Grafik. 6**  
Data Kejadian Bencana Tahun 2019-2021

**SASARAN 2 (SASARAN PENDUKUNG)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pendukung “**Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**” tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel. 13**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung**

Sasaran Pendukung :	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah			Notifikasi
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021			
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	102,94%	108,36%	●

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

#### Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

##### ❖ Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

**Indikator kinerja sasaran penunjang** adalah Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi indikator** yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah “**Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus**”.

Target Indikator sasaran penunjang adalah 95% dan realisasi 102,94% dengan persentase capaian kinerja 108,35%. Persentase capaian kinerja melebihi dari target karena beberapa kegiatan yang mendukung capaian program, realisasinya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Adanya refocussing anggaran yang berdampak pada pengurangan target beberapa sub kegiatan, khususnya terkait pengadaan barang yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam RKBMD.
- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa
- Akibat penerapan PPKM, beberapa sub kegiatan ditunda pelaksanaannya dan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun sehingga realisasi belanja yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan
- Terdapat beberapa jabatan struktural Eselon III dan IV yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- Keterbatasan personil pengelola kegiatan/sub kegiatan

#### ❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Menyusun RKBMD Perubahan dan menganggarkan kembali pada tahun berikutnya
- Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa
- Melakukan perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan pada perubahan anggaran
- Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Mencermati sub kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengantisipasi SILPA akhir tahun
- Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

#### ❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu :

- Efisiensi anggaran pada belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang masih dapat ditunda pelaksanaannya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
- Efisiensi gaji dan tunjangan ASN

- Efisiensi belanja Bimtek
- Efisiensi pengadaan pakaian dinas
- Efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah
- Efisiensi belanja listrik, telepon dan air kantor
- Efisiensi biaya pemeliharaan peralatan kantor

➤ **Efisiensi Sumber Daya**

- Terdapat beberapa jabatan struktural dan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
- Terkait refocussing beberapa sarana dan prasarana kantor yang masih bisa ditunda pelaksanaannya, maka yang dilakukan adalah memaksimalkan peralatan yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

**Tabel. 14**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	95%	102,94%	108,36 %	2.967.663.734,-	2.669.373.510,-	89,95%
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	102,94%	108,36 %	2.967.663.734,-	2.669.373.510,-	89,95%

**Tabel. 15**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Pendukung	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	108,36%	89,95%	10,05%

Pencapaian sasaran pendukung Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah sebesar 108,36% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 89,95%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 10,05%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

#### Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

**Tabel. 16**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2021	Target s.d TW 4	Realisasi s.d TW 4	Capaian (%)
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	95%	102,94 %	108,36%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	125%	125%

a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	3 Dok	150%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	2 Dok	3 Dok	150%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	10 Dok	10 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	89,47%	89,47%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	19 Org	19 Org	15 Org	78,95%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	125%	125%
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya untuk ASN dan upah jasa	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	18 Stel	18 Stel	18 Stel	100%
b.	Bimbingan	Terlaksananya	Jumlah pegawai	10 Org	10 Org	15 Org	150%

	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	peningkatan kapasitas bagi aparaturnya	yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	105,3%	105,3%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	19 Jenis	95%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	60 Expl	60 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	275 Org	275 Org	272 Org	98,91%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	58 Kali	58 Kali	80 Kali	137,93%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	100%	85,71%	85,71%
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	7 Unit	7 Unit	6 Unit	85,71%

7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	99,86%	99,86%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	500 Surat	500 Surat	498 Surat	99,60%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	36 Rek	36 Rek	100%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	93,25%	93,25%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	79 Unit	63 Unit	79,75%
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2Unit	100%

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

---

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**

**Indikator Program adalah** Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan **formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus**. Target 95% dan realisasi 102,94% dengan capaian kinerja 108,36%, dan menyerap anggaran sebesar 89,95%. Capaian kinerja program yang melebihi target karena beberapa kegiatan capaiannya > 100% sehingga bila diakumulasi maka akan menutupi kegiatan yang realisasinya <100%. Hal ini disebabkan karena terdapat sub kegiatan yang seharusnya dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran dan disamping itu terdapat pula sub kegiatan pada Triwulan IV intensitas pelaksanaannya meningkat seperti pelaksanaan Bimtek/pelatihan dan Rapat-rapat koordinasi dsb. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan yaitu :

➤ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Indikator kinerja kegiatan** adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 125%. Persentase capaian kinerja kegiatan melebihi dari target karena terdapat 2 sub kegiatan capaiannya > 100% yang seharusnya dilakukan perubahan target pada saat perubahan anggaran. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen (100%). Adapun dokumen yang disusun adalah dokumen Renja Pokok Tahun 2022, Renja Perubahan 2021 dan Renstra BPBD 2021-2026. Disediakan anggaran sebesar Rp 22.315.263,- dan terelisasi Rp 20.277.000,-(90,87%). Sisa anggaran Rp 2.038.263,- terdiri dari, Belanja Cetak Rp 234.000 , makan dan minum rapat Rp 1.575.000, Belanja ATK Rp 119.263 serta perjalanan dinas luar daerah Rp 110.000. Tersisa Belanja makan dan minum rapat

yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 3 dokumen (150%) yaitu penyusunan RKA Pergeseran dan RKA Perubahan 2021 serta RKA Pokok 2022. Realisasi yang melebihi target karena adanya refocusing anggaran sehingga dilakukan penyusunan RKA Pergeseran anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 11.332.889,- dan terelisasi Rp 7.584.500,- (66,92%). Sisa anggaran Rp 3.748.389,- terdiri dari, Belanja Cetak Rp 85.400, makan dan minum rapat Rp 3.450.000 serta Belanja ATK Rp 213.889. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, target sebanyak 2 dokumen dan realisasi 3 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 150%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD Tahun 2021 dan DPA Pergeseran Tahun 2021 serta DPA Perubahan Tahun 2021. Realisasi yang melebihi target karena adanya refocusing anggaran sehingga dilakukan penyusunan DPA Pergeseran anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 8.004.079,- dan terelisasi Rp 6.039.400 (75,45%). Sisa anggaran Rp 1.964.679,- terdiri dari makan dan minum rapat Rp 1.550.000,- , Belanja ATK Rp 139.079 dan Belanja cetak Rp 275.600,-. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi

sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

- **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% yaitu LPPD, LKPJ, LAKIP, Dokumen Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2020, Dokumen Evaluasi RKPD TW 1 TA. 2021 dan Evaluasi Kinerja TW 1 TA. 2021, Dokumen Evaluasi kinerja TW 2 TA. 2021, Dokumen Evaluasi RKPD TW 2 TA. 2021, Dokumen Evaluasi RKPD TW 3 TA. 2021 serta Dokumen Evaluasi Kinerja TW3 TA. 2021. Disediakan anggaran sebesar Rp 53.827.481,- dan terelisasi Rp 43.828.098,- (81,42%). Sisa anggaran sebesar Rp 9.999.383,- terdiri dari Belanja ATK Rp 314.481,- Belanja Cetak Rp 253.400 dan Belanja makan dan minum rapat Rp 8.150.000 serta perjalanan dinas luar daerah Rp 1.281.402. Tersisa Belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat.

### Dokumentasi Money Internal



#### ➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 89,47% dengan persentase capaian kinerja 89,74%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 78,95%, yang diakibatkan adanya beberapa jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi personil serta mutasi staf. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

#### - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 19 org dan realisasi 15 org dengan persentase capaian kinerja 78,95 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan struktural eselon III dan IV yang belum terisi. Disediakan anggaran sebesar Rp 1.914.900.589,- dan terelisasi Rp 1.695.089.814,- (88,52%). Adanya jabatan struktural yang masih kosong mempengaruhi realisasi gaji dan tunjangan.

- **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, target 18 dokumen dan realisasi 18 dokumen (100%) yaitu Laporan Bulanan Bendahara 12 Dokumen, Laporan Tahunan 1 Dokumen, LRA 1 Dokumen, Calk 1, Laporan Semester 1 dan 2 serta Laporan prognosis. Disediakan anggaran sebesar Rp 61.768.908,- dan terelisasi Rp 55.023.000,- (89,08%). Sisa anggaran Rp 6.745.908,- terdiri dari Belanja ATK Rp 80.908,-, Belanja Cetak Rp 565.000,- makan dan minum rapat Rp 3.875.000,- Honor tenaga administrasi Rp 1.000.000,- serta perjalanan dinas luar daerah Rp 1.225.000. Terdapat sisa belanja makan dan minum rapat yang cukup besar karena beberapa agenda rapat yang direncanakan tidak terlaksana selama masa pandemi covid-19 karena aktifitas pemulasaran yang sangat tinggi sehingga sulit mengumpulkan orang dalam waktu yang bersamaan sehingga beberapa agenda rapat yang direncanakan digabung dalam satu pelaksanaan rapat. Sedangkan honor tenaga administrasi tidak terealisasi selama 1 bulan karena adanya penggantian staf administrasi baru yang pembayaran honorinya disesuaikan dengan SK.

➤ **Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh.

- **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan target sebanyak 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 4 dokumen (TW I s.d TW IV). Disediakan anggaran sebesar Rp 19.999.400 dan realisasi Rp 18.525.000 (92,63%) Sisa anggaran sebesar Rp 1.474.400,- terdiri dari, Belanja ATK Rp 854.400,- Belanja

Cetak Rp 240.000,- , dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 380.000,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dalam penyusunan laporan.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 125% dengan persentase capaian kinerja 125%. Capaian kinerja melebihi dari target, karena dari 2 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, capaian kerjanya 150%, hal ini disebabkan karena pada Triwulan IV, banyak kegiatan Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Propinsi maupun oleh Daerah. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan, dengan target 18 stel dan realisasi 18 stel (100%). Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2021 namun baru terealisasi pada triwulan III TA. 2021. Hal ini disebabkan karena PPTK terkendala bentuk pertanggungjawaban (SPJ) untuk belanja barang dan jasa pengadaan baju dinas sehingga dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pejabat pengadaan, disamping itu banyaknya OPD yang melakukan pemesanan pakaian dinas ditempat yang sama. Adapun pengadaannya terdiri Baju PSR eselon II 1 stel, PSR eselon III 3 stel, Baju PDH eselon IV 7 stel dan Baju PDH staf/upah jasa 7 stel. Disediakan anggaran sebesar Rp 15.350.000,- dan realisasi 100%.

- **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target sebanyak 10 org dan realisasi 15 orang (150%) yaitu Pelatihan resiko zoonosis berpotensi wabah 1 org, Pelatihan teknis sistem komando penanganan darurat bencana 2 org, Workshop RPB 1

org, pelatihan mitigasi dan sosialisasi KIE 1 org, Bimtek pengelolaan BMD 1 org, Bimtek penguatan SAKIP 2 org, Bimtek Pengelolaan arsip dinamis 1 org, Pelatihan manaj.posko tanggap darurat bencana 2 org, Pelatihan manaj. Logistik 1 org, Revolusi mental 1 org, Bimtek inovasi pelayanan publik 2 org. Capaian kinerja melebihi dari target yaitu sebesar 150%, hal ini disebabkan karena pada Triwulan IV, banyak kegiatan Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Propinsi maupun oleh Daerah yang merupakan dampak dari pemberlakuan PPKM Level 2 dimana beberapa aktifitas/kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Disediakan anggaran sebesar Rp 57.100.000,- dan realisasi Rp 50.023.150,- (87,61%). Sisa anggaran sebesar Rp 7.076.850,- terdiri dari Belanja Bimtek Rp 4.500.000,- dan Belanja perjalanan dinas Rp 2.576.850,-. Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena Berdasarkan SBM, besaran untuk belanja bimtek/orang sebesar Rp 5.000.000, namun pada pelaksanaan beberapa bimtek yang diikuti, biaya kontribusi lebih rendah dari SBM sehingga terdapat sisa belanja. Begitu juga dengan belanja perjalanan dinas, beberapa kegiatan pelatihan yang diikuti ditanggung akomodasi dan konsumsi oleh Panitia penyelenggara sehingga besaran perjalanan dinas yang dibayarkan dibawah dari besaran perjalanan dinas dalam Standar Biaya Masukan. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan undangan pemanggilan peserta.

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 105,3% dengan persentase capaian kinerja 105,3%. Capaian kinerja melebihi dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian kerjanya 137,93%, dan capaian tersebut berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan terealisasi 8 jenis (100%). Adapun komponen alat listrik yang disediakan yaitu Kabel, steker, terminal, balon lampu,Lampu sorot, pitting lampu dan trafo. Kebutuhan alat listrik disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Disediakan anggaran sebesar Rp 17.440.000,- dan terealisasi Rp 16.970.000,- (97,31%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 20 jenis dan realisasi 19 jenis (95%) terdiri dari BBM operasional, Oli pelumas dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 29.349.250,- dan terealisasi Rp 27.930.500,- (95,17%). Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, target 3 jenis setiap triwulan dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 47.625.000,- dan terealisasi Rp 36.881.000,- (77,44%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 10.744.000,- Realisasi keuangan tidak sesuai dengan target karena disediakan untuk belanja cetak baliho untuk peringatan hari-hari tertentu di Kab. Luwu Timur namun tidak dapat terealisasi.

[Dokumentasi Baliho peringatan dini bencana](#)



- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, target 60 exp dan terealisasi 60 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal 12 expl, Koran Nasional 12 expl dan Koran Regional 36 expl. Disediakan anggaran sebesar Rp 6.120.000,- dan terealisasi Rp 6.120.000,- (100%).

- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target sebanyak 275 org dan terealisasi 272 org dengan capaian kinerja 98,91%. Dan disediakan anggaran sebesar Rp 12.375.000,- dan terealisasi Rp 12.047.000,- (97,35%).

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target sebanyak 58 kali dan terealisasi 80 kali dengan capaian kinerja 137,93%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan urgen yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Disamping itu beberapa undangan/kegiatan rakor yang pembiayaannya ditanggung oleh pihak penyelenggara sehingga terdapat biaya seperti biaya akomodasi dan transport tidak dibayarkan melalui APBD sehingga anggaran dapat digunakan lebih dari target yang direncanakan. Disediakan anggaran sebesar Rp 395.153.400,- dan terealisasi Rp 393.557.450,- (99,60%).

➤ **Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 85,71% dengan persentase capaian kinerja 85,71%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena dari 7 unit peralatan dan mesin yang direncanakan, terealisasi hanya 6 unit. Hal ini disebabkan adanya 1 unit pengadaan barang yang spesifikasi yang

termuat dalam DPA-SKPD dan tidak terdapat dipasaran. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan, target 7 unit dan terealisasi 6 unit (85,71%) yaitu Pengadaan Laptop 1 unit, Printer 2 unit, Scanner 1 unit dan Kursi kerja eselon IV 2 unit. Sedangkan lemari arsip tidak terealisasi karena spesifikasi yang diinginkan sesuai yang tercantum dalam DPA tidak terdapat dipasaran. Disediakan anggaran Rp 45.647.000,- dan realisasi Rp 37.875.000 (82,97%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7.772.000,- terdiri dari belanja lemari arsip Rp 4.947.000,- dan sisa belanja kursi sebesar Rp 2.200.000.



➤ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 99,86% dengan persentase capaian kinerja 99,86%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target 500 surat dan terealisasi 498 surat dengan persentase capaian kinerja 99,6%. Terdiri dari 359 surat masuk dan 139 surat keluar. Disediakan anggaran sebesar Rp 4.195.475,- dan realisasi Rp 3.740.500 (89,16%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 454.975,- terdiri dari belanja ATK Rp 294.975,- dan paket pengiriman Rp 160.000,-. Penggunaan anggaran untuk belanja paket pengiriman dan ATK disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target sebanyak 36 rekening dan realisasi 36 rekening dan terealisasi 36 rekening dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut karena dilakukan penyesuaian target pada saat perubahan anggaran. Disediakan anggaran sebesar Rp 52.500.000,- dan realisasi Rp 44.348.254 (84,47%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 8.151.746,- terdiri dari belanja Listrik Rp 6.840.746,-, belanja air Rp 631.000 dan belanja telepon Rp 680.000. Realisasi keuangan kurang dari 100% karena rendahnya pemakaian air kantor selama beberapa bulan. Disamping itu rekening telepon (Nomor ON CALL) yang terblokir, baru terbayarkan pada bulan Desember 2021. Dan terdapat penurunan pemakaian listrik selama beberapa bulan.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target 2 orang dan realisasi 2 orang (100%) yaitu terbayarnya honor upah jasa cleaning service dan pejabat pengadaan. Disediakan anggaran sebesar Rp 19.800.000,- dan Realisasi Rp 19.800.000 (100%). Anggaran digunakan untuk pembayaran honor pejabat pengadaan dan cleaning service selama 12 bulan.

➤ **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan **Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus**. Target 100% dan realisasi 93,25% dengan persentase capaian kinerja 93,25%. Capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena dari 3 sub kegiatan pengampuh, terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capain kinerjanya hanya 79,75%. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target 13 unit dan realisasi 13 unit dengan persentase capaian kinerja 100%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Motor 7 unit, Mobil Truk Serbaguna 1 unit, Double Cabin 2 unit, Mobil wterreatment 1 unit dan mobil Operasional TRC 1 unit. Disediakan anggaran sebesar Rp. 99.850.000,- dan realisasi Rp. 98.554.844,- (98,70%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.295.156,- . Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang mengalami kerusakan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target sebanyak 79 unit dan terealisasi 63 unit dengan persentase capaian kinerja 79,75%. Realisasi yang tidak sesuai target karena beberapa peralatan kantor dan peralatan bencana yang disediakan anggaran pemeliharaannya, masih dalam kondisi baik. Disediakan anggaran sebesar Rp. 43.010.000,- dan realisasi Rp. 30.295.000,- (70,44%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.715.000,-. Pada dasarnya penggunaan anggaran pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target 2 unit dan realisasi 2 unit (100%). Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah Perbaikan lantai Posko (Rabat beton) serta pengecatan gedung kantor BPBD dan Gudang Logistik serta pagar. Disediakan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasi Rp. 29.514.000,- (98,38%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 486.000,-. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan gedung kantor BPBD dan gudang logistik.

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2023 antara lain :

1. Berdasarkan data kejadian bencana tahun 2021, jumlah kejadian bencana yang terjadi sebanyak 178 kejadian yang terdiri dari Kebakaran 10 kejadian (Kebakaran Hutan dan Lahan 0 Kejadian dan Kebakaran rumah/ruko/gudang/hotel/pasar 10 Kejadian), Cuaca Ekstrim 6 Kejadian, Banjir 2 Kejadian, Tanah Longsor 2 Kejadian, Orang Hilang/Tenggelam 5 Kejadian dan Gempa Bumi 153 kejadian. Dan kejadian bencana yang mendominasi di tahun 2021 yaitu Gempa Bumi. Kejadian tersebut kebanyakan terjadi di Luar Kabupaten Luwu Timur namun terasa getarannya. Intensitas kejadian gempa bumi meningkat setelah terjadinya kejadian gempa bumi akibat pergerakan sesar palu koro. Dan perlu menjadi perhatian yaitu adanya Sesar Matano serta keberadaan 3 Dam Seri Larona. Olehnya itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut
2. Terdapat 3 (tiga) bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dibangun seri pada DAS Larona, aktifitas operasional dam mempengaruhi debit air sungai Larona yang selalu naik dan menggenangi areal persawahan, perkebunan dan pemukiman masyarakat. Kegagalan pada salah satu dam menjadi ancaman yang dapat menyebabkan bencana besar. Kondisi ini memerlukan upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang

melibatkan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang akan terkena dampak.

3. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat dan kondisi yang sangat kompleks, yaitu sulit diprediksinya musim hujan dan kemarau yang berpengaruh terhadap musim tanam bagi sebagian petani di sebagian wilayah di Indonesia. Selanjutnya, banjir yang diakibatkan oleh cuaca yang ekstrem, seperti hujan lebat dengan intensitas yang tinggi pada periode yang pendek, sedangkan kondisi dan kapasitas lingkungan tidak siap menerimanya. Potensi bencana yang tinggi tidak hanya menjadi refleksi fenomena alam secara geografis yang sangat khas untuk suatu wilayah, tetapi merupakan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan (vulnerability) masyarakat yang membutuhkan mekanisme adaptasi.
4. Daerah rawan bencana (Penanganan Mitigasi Daerah Rawan Bencana)
5. Dampak Pandemi Covid-19, dimana kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.
6. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis;
7. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
8. Luasnya cakupan wilayah penanganan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil serta peralatan yang tersedia;
9. Masih lemahnya koordinasi antar instansi di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, badan usaha, LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
10. Pelaksanaan SPM serta ketentuan umum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang didalam isinya mengharuskan jenis dan mutu pelayanan dasar sebagai urusan wajib daerah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

### 1.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang pada daerah-daerah yang rawan bencana berdasarkan kajian risiko bencana.
- b. Melakukan kajian resiko bencana pada daerah yang berpotensi bencana sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan penanggulangan bencana dan memulihkan kondisi yang rusak akibat bencana.
- c. Segera menyusun Rencana Kontijensi ancaman Gempa Bumi, Longsor, Banjir Bandang (mengesahkan, mensosialisasikan, dan menguji dalam geladi/simulas)
- d. Memetakan fasilitas umum penting di area rawan bencana; Sekolah, fasilitas kesehatan, Desa
- e. Melakukan upaya peringatan dini terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi pada daerah-daerah rawan bencana.
- f. Meningkatkan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang kebencanaan dan penanggulangan bencana.
- g. Menegakkan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dengan tegas.
- h. Membentuk Forum PRB dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah
- i. Mengalokasikan minimal 1% APBD untuk Pengurangan Risiko Bencana (Pencegahan, Mitigasi, kesiapsiagaan dan EWS) dapat melekat pada OPD strategis tidak hanya di BPBD
- j. Mengalokasikan 0.5% APBD untuk Belanja Tidak terduga khusus bencana
- k. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penanggulangan bencana.
- l. Menyediakan sarana dan prasana penanggulangan yang memadai.
- m. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
- n. Menindaklanjuti Rencana Tanggap Darurat PT. Vale Indonesia Tbk. Terkait penanganan Dam Larona.
- o. Mempersiapkan data terkait kebutuhan logistik dan stok ketersediaan pangan pada OPD terkait untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
- p. Mempersiapkan data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD terkait maupun dunia usaha dalam mengantisipasi kejadian bencana.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Pada proses perjalanannya, beberapa rancangan awal mengalami perubahan dan perbaikan sesuai kebutuhan, ketersediaan dan efisiensi anggaran serta efektifitas suatu program dalam pelaksanaannya. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C. 31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Luwu Timur**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA OPERASI				7,149,598,408	BELANJA OPERASI				4,565,959,550	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	95%	4,173,598,408	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Kab. Luwu Timur	95%	3,004,629,952	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur	100%	86,250,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur	100%	77,759,131	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	21,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	37,716,145	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	12,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4,785,466	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	12,750,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 Dokumen	4,365,240	

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Dokumen	40,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Dokumen	30,892,280	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	2,421,768,908	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	Kab. Luwu Timur	100%	2,112,095,598	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 orang	2,350,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	16 orang	2,072,278,776	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	18 Dokumen	61,768,908	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	18 Dokumen	39,816,822	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	35,000,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100%	18,009,260	
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	4 Dokumen	20,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	4 Dokumen	18,009,260	

9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	2 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-	
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	1 Dokumen	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-	
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	90,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	48,750,000	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	18 Stel	20,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	19 stel	13,250,000	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 orang	60,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 orang	35,500,000	
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	1 Dokumen	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	0 Dokumen	-	
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	519,500,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	100%	393,759,800	

14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Jenis	18,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	8 Jenis	12,625,000	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 Jenis	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	20 Jenis	25,000,000	
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	40,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	25,000,000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 exemplar	6,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	60 exemplar	6,720,000	
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 orang	15,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275 orang	14,850,000	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 kali	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58 kali	309,564,800	

20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen	10,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 Dokumen	-	
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur	100%	765,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur	100%	145,000,000	
21	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	10 Unit	25,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	6 unit	15,000,000	
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	15 unit	40,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	5 unit	30,000,000	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	5 unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	5 unit	15,000,000	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	85,000,000	
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	500,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 unit	-	

26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 unit	50,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	0 unit	-	
VIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur	100%	91,079,500	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur	100%	86,416,163	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 surat	4,250,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 surat	4,195,475	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	36 Rekening	65,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	36 Rekening	62,420,688	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 orang	21,829,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	2 orang	19,800,000	
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	165,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur	100%	122,840,000	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 unit	110,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 unit	93,300,000	

31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105 unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79 unit	19,540,000	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	10,000,000	
B	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	2,976,000,000	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	100%	1,561,329,598	
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%		
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%			Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender		100%		
IX	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0.10%	475,000,000	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur	0.10%	196,509,509	

33	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/lega	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	350,000,000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/lega	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	175,000,000	
34	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 org	125,000,000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 org	21,509,509	
X	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur	2.12%	1,075,000,000	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur	2.12%	489,830,000	
		Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun		100%			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun		100%		
35	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 org	150,000,000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 org	35,000,000	
36	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	21 unit	75,000,000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	21 unit	94,830,000	

37	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Desa	200,000,000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Desa	35,000,000	
38	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	50 orang	75,000,000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	50 orang	30,000,000	
39	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	200,000,000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	175,000,000	
40	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	300,000,000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	
41	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	500 org	75,000,000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	250 org	20,000,000	
XI	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur	100%	1,225,000,000	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur	100%	755,000,000	

42	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	850,000,000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	625,000,000	
43	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100,000,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40,000,000	
44	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100,000,000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40,000,000	
45	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75,000,000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20,000,000	
46	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100,000,000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30,000,000	
XII	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Kab. Luwu Timur	100 %	201,000,000	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	Kab. Luwu Timur	100 %	119,990,089	
47	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	75,000,000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	65,000,000	

48	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	21,000,000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	19,990,089		
49	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75,000,000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	35,000,000		
		Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen			Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Dokumen			
50	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	20,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-		
51	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	10,000,000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 unit	-		
JUMLAH TOTAL					7,149,598,408	JUMLAH TOTAL					4,565,959,550	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan. program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, Perusahaan/ Instansi Swasta, yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2023 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum SKPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif. Dan pada pelaksanaan Musrenbang Tahun 2023, tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan.

**Tabel (T-C.32)**  
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Luwu Timur

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		<b>TIDAK ADA</b>			

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

##### **3.1.1 Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana**

Arah kebijakan nasional penanggulangan bencana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 beserta peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008.

Landasan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asas penanggulangan bencana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yaitu

1. Keadilan
2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
3. Keseimbangan
4. Ketertiban dan kepastian hukum
5. Kebersamaan
6. Kelestarian lingkungan hidup
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, yaitu cepat dan tepat, prioritas, kordinasi dan keterpaduan, berdaya dan hasil guna, transparansi dan akuntalibitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif dan nonproseliti yaitu dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

##### **3.1.2 RPJMN IV (2020-2024)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, merupakan tahapan terakhir dari RPJPN (2005-2025) sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai RPJPN 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 yaitu :

1. Kelembagaan Politik dan Hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. **“ Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”**
7. Memperkuat stabilitas Polhukkanham dan tranformasi pelayanan publik.

Terkait Agenda ke-6, maka Pembangunan Nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, dan akan diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ketahanan Bencana
3. Pembangunan Rendah Karbon.

Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Penanggulangan Bencana; dan
- 2) Peningkatan Ketahanan Iklim

Terkait dengan **“Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim”**, maka agenda konvergensi antara Adaptasi Perubahan Iklim (API) dengan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) semakin ditingkatkan dalam periode 5 tahun terakhir. Baik melalui kegiatan perencanaan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan, serta peningkatan partisipasi aktif Indonesia dalam perundingan dan kerjasama internasional.

### 3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional serta Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down*. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku Kepentingan.

Tema Pembangunan RKP 2023 disusun dengan mempertimbangkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024, hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Tahun 2021 serta Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 guna menjamin keberlanjutan pembangunan. Dengan terjadinya Pandemi Global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian Perekonomian Dunia dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional pada Tahun 2021, maka Tema Pembangunan RKP 2023 diarahkan kepada proses Pemulihan Pembangunan Nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim

Adapun Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Dengan Mengacu pada Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan tersebut diatas, maka Arah Kebijakan yang menjadi Prioritas RKP 2023 adalah :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi :
  - Penguatan system jaminan sosial
  - Percepatan modernisasi pertanian
  - Peningkatan pemerataan pembangunan
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan Pendidikan, dilaksanakan melalui strategi :
  - Penguatan system Kesehatan nasional
  - Peningkatan kualitas pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job, dilaksanakan melalui strategi :
  - Perluasan penyediaan lapangan usaha
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dilaksanakan melalui strategi :
  - Percepatan revitalisasi pariwisata
  - Memperkuat peran UMKM dalam perekonomian nasional
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. IV - 311 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan melalui strategi :
  - Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industry
  - Penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon perubahan iklim), dilaksanakan melalui strategi :
  - Mendorong aktifitas ekonomi rendah karbon
  - Percepatan transisi energi
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dilaksanakan melalui strategi :
  - Peningkatan penyediaan air bersih sanitasi
  - Percepatan pemerataan infrastruktur digital
  - Percepatan pemerataan infrastruktur konektor

8. Pembangunan Ibukota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi :
  - Percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

#### **3.1.4 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.**

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang terlahir dijabarkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Prioritas tahun 2023 masih banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi Selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angkaangka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu “Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penguatan infrastruktur wilayah
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonom
5. Pembangunan manusia
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
7. Pelestarian lingkungan hidup

Arah Kebijakan Pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

yaitu :

1. Penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik
2. Penyediaan insfrastruktur sumberdaya air
3. Peningkatan lapangan kerja, investasi dan industrialisasi pengolahan produk unggulan daerah
4. Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan melalui kelompok usaha Bersama (KUBE) atau kelompok social lainnya
5. Akselerasi peningkatan kualitas lulusan Pendidikan menengah umum dalam meluluskan tamatan pada seleksi perguruan tinggi negeri berprestasi
6. Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan Kesehatan dasar
7. Peningkatan kapasitas Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga serta pemenuhan hak anak
8. Peningkatan peran masyarakat dan Lembaga keagamaan dalam aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan pembangunan
9. Peningkatan pemberdayaan Lembaga kegamaan pesantren dalam penyelenggaraan kegamaan, dalam aktualisasi nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari
10. Peningkatan ekspor melalui nilai tambah dan daya saing produk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan serta kemaritiman
11. Penyediaan infrastruktur pengolahan air limbah
12. Penguatan upaya pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan rendah karbon.

### **3.1.5 Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**

Sebagaimana arahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dimana pada Tahun 2023 upaya pembangunan semakin diakselerasikan untuk pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur daerah, dan pemenuhan layanan dasar yang menjadi prioritas utama. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai Sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan operasional pada OPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Adapun arah kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi terkait dapat dilihat pada tabel berikut :

#### **3.1.5.1 Tema Pembangunan**

Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah “Akselerasi Pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur daerah, dan pemenuhan layanan dasar”. Dengan mengakselerasi Pertumbuhan ekonomi dan Penguatan Infrastruktur sebagai dasar Pemerintah daerah untuk mengidentifikasi beberapa faktor dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang fokus pada sektor pertanian, dan Pariwisata dalam upaya mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan investasi, Peluang Usaha yang Berdaya Saing serta menjaga kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada, agar tetap berfungsi dengan baik dan mantap. Pemenuhan Layanan dasar dimaksudkan untuk memenuhi standar Pelayanan Minimal guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus menerus

dengan penguatan SDM Unggul yang sehat dan berpendidikan, SDM Unggul yang berkebudayaan dan Religius, dan SDM Unggul secara Ekonomi

### **3.1.5.2 Sasaran Pembangunan**

Sasaran dalam RKPD adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan/Tema, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang hendak diwujudkan yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Berdasarkan tema tersebut maka sasaran Makro pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan infrastruktur daerah dengan indikator (a) Pertumbuhan Ekonomi; (b) Gini Ratio; (c) PDRB Perkapita ; (d) Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Pemenuhan Layanan Dasar dengan indikator (a) Indeks Pembangunan Manusia; (b) Angka Kemiskinan

### **3.1.5.3 Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023**

Berdasarkan Tema, Tujuan, Sasaran serta Arah umum kebijakan dan strategi pembangunan daerah RKPD tahun 2023 selanjutnya dituangkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Daerah (PD). Kelima (PD) tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2021 –2026 dan tetap dipertahankan pada RKPD Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan Rancangan RPJMD 2021-2026 sebagai langkah awal dalam pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan periode selanjutnya dalam lima tahun kedepan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun prioritas pembangunan RKPD Tahun 2023 disinergikan Prioritas Pembangunan Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata;
3. Penguatan Infrastruktur dalam Mendukung Sektor Pertanian dan Pariwisata;
4. Peningkatan Investasi dan Peluang Usaha yang Berdaya Saing;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif;
6. Menjaga Toleransi Umat Beragama dan Kelestarian Nilai Budaya.

### 3.1.6 Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Adapun Bidang Urusan terkait Penanggulangan Bencana yaitu "**Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**", dengan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu "**Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana**", dengan indikator kinerjanya yaitu :

1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana
2. Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan
3. Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya
4. Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana
5. Persentase penanganan pasca bencana
6. Persentase penanganan tanggap darurat bencana.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu Timur.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah :

1. Menurunkan risiko bencana daerah
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

### 1.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Penganggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana
2. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

**Tabel. 17**  
**Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,45 (sedang)
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	95%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merencanakan 2 program dengan 12 kegiatan, yang terdiri dari 1 program utama dengan 4 kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 1 program pendukung dengan 8 kegiatan yang menunjang tugas kesekretariatan agar fungsi organisasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### 3.1.1 Program Utama

##### 1. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana :
  - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
  - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
  - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  - Penyusunan Rencana Kontijensi
  - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :
  - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
  - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana :
  - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
  - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
  - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

### **3.1.2 Program Pendukung**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
  - Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitas Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**TABEL. T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4,565,959,550				6,004,520,975			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,004,629,952				3,745,970,975			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					77,759,131				91,050,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	37,716,145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	22,050,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	4,785,466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	13,500,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	4,365,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	13,500,000

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	10 Dokumen	100%	30,892,280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	42,000,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,112,095,598		2,542,500,000		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	16 Orang	100%	2,072,278,776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	2,467,500,000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase administrasi rakneuangan yang terselenggara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	18 Dokumen	100%	39,816,822	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	62,500,000
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								18,009,260		41,500,000		
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	4 Dokumen	100%	18,009,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	22,500,000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								48,750,000		97,500,000		

1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	19 Stel	100%	13,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	22,500,000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	15 Orang	100%	35,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	62,500,000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							393,759,800				553,500,000		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	8 Jenis	100%	12,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	19,000,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95%	20 Jenis	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	32,500,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	3 Jenis	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	42,500,000

1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	60 Exemplar	100%	6,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	7,000,000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	275 Orang	100%	14,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	15,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	58 Kali	100%	309,564,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	425,000,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							145,000,000				150,000,000	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	6 Unit	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	30,000,000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	5 Unit	100%	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	42,500,000
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	1 Unit	100%	85,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	-

1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	3 Unit	100%	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	22,500,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							86,416,163			94,920,975		
1	05	01	2.08	1.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95%	400 Surat	100%	4,195,475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	4,500,000
1	05	01	2.08	2.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	36 Rekening	100%	62,420,688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	67,500,000
1	05	01	2.08	4.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Orang	100%	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	22,920,975
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							122,840,000			175,000,000		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	13 Unit	100%	93,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	115,000,000

1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	79 Unit	100%	19,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	32,500,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Unit	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	27,500,000
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>							<b>1,561,329,598</b>			<b>2,258,550,000</b>		
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							196,509,509			145,000,000		
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	0.12%	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang	0.12%	21,509,509	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	145,000,000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							489,830,000			615,000,000		

1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	2.79%	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 Orang	2.79%	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	160,000,000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	21 Unit	2.79%	94,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	90,000,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Desa	2.79%	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	210,000,000

1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	50 Orang	2.79%	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	80,000,000
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	2.79%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang	2.79%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	75,000,000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							755,000,000			1,280,000,000		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	625,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	900,000,000

1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100,000,000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100,000,000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	80,000,000
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100,000,000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							119,990,089			218,550,000		

1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100 % 2.79 %	19,990,089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	22,050,000
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	1 Lembaga	100 % 2.79 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	75,000,000
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen 1 Dokumen	100 % 2.79 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	90,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>4,565,959,550</b>		<b>6,004,520,975</b>			

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 2 program, 12 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 4.565.959.550,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>								<b>4,565,959,550</b>	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							<b>3,004,629,952</b>	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							77,759,131	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	37,716,145
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	4,785,466
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Dokumen	100%	4,365,240
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	10 Dokumen	100%	30,892,280
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,112,095,598	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	16 Orang	100%	2,072,278,776
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semeste SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase administrasi rakneuangan yang terselenggara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	18 Dokumen	100%	39,816,822
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							18,009,260	

7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	4 Dokumen	100%	18,009,260
IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									48,750,000
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	19 Stel	100%	13,250,000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	15 Orang	100%	35,500,000
V Administrasi Umum Perangkat Daerah									393,759,800
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	8 Jenis	100%	12,625,000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95%	20 Jenis	100%	25,000,000
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	3 Jenis	100%	25,000,000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	60 Exemplar	100%	6,720,000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	275 Orang	100%	14,850,000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	58 Kali	100%	309,564,800
VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									145,000,000
16	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	6 Unit	100%	15,000,000
17	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	5 Unit	100%	30,000,000
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	1 Unit	100%	85,000,000
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	3 Unit	100%	15,000,000

VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								86,416,163
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	95%	400 Surat	100%	4,195,475
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	36 Rekening	100%	62,420,688
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Orang	100%	19,800,000
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								122,840,000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	13 Unit	100%	93,300,000
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95%	79 Unit	100%	19,540,000
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	95%	2 Unit	100%	10,000,000
B	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>								<b>1,561,329,598</b>
IX	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								196,509,509
26	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	0.12%	175,000,000
27	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang	0.12%	21,509,509
X	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								489,830,000
28	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	2.79%	175,000,000
29	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	50 Orang	2.79%	35,000,000
30	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	21 Unit	2.79%	94,830,000
31	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Desa	2.79%	35,000,000

32	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100%	50 Orang	2.79%	30,000,000
33	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen Renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	2.79%	100,000,000
34	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah warga negara yang ikut pelatihan	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	250 Orang	2.79%	20,000,000
XI	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								755,000,000
35	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	625,000,000
36	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	40,000,000
37	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	40,000,000
38	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	20,000,000
39	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	30,000,000
XII	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								119,990,089
40	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100 % 2.79 %	19,990,089
41	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	100%	1 Lembaga	100 % 2.79 %	65,000,000

42	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi pasca bencana yang disusun Jumlah dokumen pemulihan rekonstruksi pasca bencana yang disusun	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen 1 Dokumen	100 % 2.79 %	35,000,000
<b>TOTAL</b>									<b>4,565,959,550</b>

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2023, sehingga upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, berkelanjutan dan bersinergi dengan OPD yang membidangi fungsi lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan pada tahun berikutnya.

Malili, 22 Juni 2022

 **KERALA PELAKSANA,**  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004